



SUBBAGIAN HUMAS DAN TU KALAN

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI

SUMATERA BARAT

Jl. Khatib Sulaiman No. 54. Padang 25137 Tlp. 0751-40818 Fax 0751-40811/40817

Koran		hlm
Haluan		
Padang ekspres		
Singgalang	✓	20
Posmetro		
.....		

Tahun: 2017	
Bulan:	
Jan	Jul
Feb	Agust
Maret	Sep
April	Okt
Mei	✓ Nov
Jun	Des

Tanggal				
1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	30
31				

LAPORAN ASET DAN BARANG

Indikator Penting Penilaian BPK

Pariaman, Singgalang

Walikota Pariaman, Mukhlis Rahman mengungkapkan, laporan pengelolaan aset dan barang milik daerah yang dituangkan dalam neraca keuangan daerah maupun dalam Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan indikator penting bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam menentukan penilaian opini kinerja pemerintah kabupaten/kota.

"Laporan aset dan barang

milik daerah harus jelas. Laporan yang disajikan harus sesuai dengan kondisi terakhir, jangan dilebihkan dan juga dikurangi. Apa adanya saja. Yang penting laporan tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Karena ini adalah indikator penting penilaian opini oleh BPK RI," kata Mukhlis Rahman saat sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 19 Tahun 2016 baru ini.

Dikatakan, penerapan teknologi berupa aplikasi pelaporan aset dan barang milik daerah yang digagas kementerian terkait maupun yang digagas BPK dan BPKP, hendaknya jangan membuat tim penyusun laporan lengah dan ceroboh. Teknologi aplikasi itu hanya alat bantu untuk memudahkan proses pelaporan, sedangkan data dan informasi terkait aset dan barang milik daerah itu tim yang menyediakan, katanya.

Wako berharap sosialisasi Permendagri 19/2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah dan sosialisasi perubahan aplikasibarang milik daerah dari versi 2.0.7.3 menjadi versi 2.0.7.7 rilis kedua tersebut, akan mendorong terciptanya tata kelola aset dan barang milik daerah yang lebih baik dan transparan, lebih profesional dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. (301)